

**STRATEGI
DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2004 MENURUT HUKUM ISLAM**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUWALLIYATUZ ZAHRA
NIM : 04370067**

**PEMBIMBING :
1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM
2. DRS. OCTOBERRINSYAH, M. AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Sebagai partai yang dianggap *resudu* dari Orba, adalah beban psikologis dan citra negatif dan bahkan menjadi demarketisasi partai-partai baru terutama partai-partai Islam dan partai berbasis Islam. Di pemilu 2004 beban sebagai *resudu* Orba “seolah-olah” mengurangi beban berat psikologis tersebut dan menjawab analisis-analisis pengamat politik bahwa PPP di pemilu 2004 akan hilang dari sejarah politik nasional, dan khususnya Jawa Timur. Sehingga kemudian apakah strategi DPW PPP Jawa Timur 2004 sesuai dengan Hukum Islam? Sehingga di pemilu 2004 mampu meraup suara yang signifikan daripada pemilu 1999 dan pemilu 2009.

Adapun pendekatan strategi yang dilakukan meliputi: *pertama*, Pendekatan kultural secara substantif-essensial terhadap kyai-kyai pesantren dan warga Nahdiyyin ditengah berkecamuknya konflik PKB terutama didaerah-daerah Tapal Kuda. *Kedua*, pendekatan pragmatis yaitu meliputi perekrutan calon legeslatif yang memiliki *marketable* dan citra politik. *Ketiga*, pendekatan substantive-pragmatis, yaitu pendekatan melalui kampanye yang bersifat atraktif, simpatik, dan empatik seperti sunatan massal, pengobatan gratis, pelibatan tokoh-tokoh nasional dalam berkampanye, hingga strategi istighosah atau doa bersama dilakukan serta bantuan hukum bagi masyarakat yang memiliki kasus hukum termasuk terhadap PKL, dan paguyuban becak. *Keempat*, pendekatan struktural, yaitu resolidisasi dan restrukturisasi pengurus partai hingga sampai tingkat ranting dan resolidisasi terhadap sayap kanan partai.

Amaliyah siyasāh tersebut yang tertuang dalam strategi yang dilakukan oleh kader PPP mulai dari DPW sampai ranting telah membuat pemilih untuk kembali kerumah lamanya, *amaliyah* dalam kemenangan pemilu 2004 tersebut, adalah *amaliyah yaumiyah* (kegiatan sehari-hari) kader PPP. *Amaliyah* tersebut tidak hanya bersifat insidental, tetapi istiqomah.

Dari perspektif *al-Maṣlahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang oleh hukum tidak dinyatakan pembedarannya dan juga tidak ditegaskan ketidakbenarannya. Kemaslahatan jenis ini bersifat netral, dalam arti tidak ditemui dalil dari *al-Syari'* yang dapat dijadikan dasar pembedaran dan atau pembatalan. Jadi masyarakatlah yang menentukan tentang *amaliyah* tersebut bisa diterima atau ditolak. Dalam perspektif etika politik pun, *amaliyah* tersebut sejatinya merupakan etika Islam yaitu *taklif al fi'l*, dimana untuk menegakkan visi dan misi partai yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan harga mati dan harus dilakukan tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadist.

Setelah dilakukan penelitian Strategi DPW PPP Jawa Timur menghadap pemilu 2004 dalam pandangan hukum Islam, khususnya *al-Maṣlahah al-Mursalah* dan etika politik khususnya *Taklif fi'l* tidak didapatkan hal yang bertentangan dengan sumber hukum Islam tersebut, dikarenakan ajaran Islam sudah menjadi asas perjuangan politik dan asas berkehidupan sosial. Bagi sebagian kalangan NU, PPP adalah "agama kedua".

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Muwalliyatuz Zahra
Lamp : Empat (4) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muwalliyatuz Zahra
NIM : 04370067
Judul Skripsi : Strategi DPW Partai Persatuan Pembangunan
Jawa Timur Dalam Menghadapi Pemilu 2004
Menurut Hukum Islam

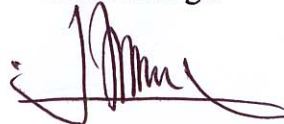
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Muharram 1431 H
5 Januari 2011 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP.196802021993031003

Drs. Octoberrinsyah, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Muwalliyatuz Zahra
Lamp : Empat (4) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muwalliyatuz Zahra
NIM : 04370067
Judul Skripsi : Strategi DPW Partai Persatuan Pembangunan
Jawa Timur Dalam Menghadapi Pemilu 2004
Menurut Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Muharram 1431 H
5 Januari 2011 M

Pembimbing II


Drs. Octoberrinsyah, M. Ag
NIP.196810201998031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. JS. SKR/PP. 00.9/070/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Strategi DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur dalam Menghadapi Pemilu 2004 Menurut Hukum Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muwalliyatuz Zahra T.

NIM : 04370067


Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A- (85,00)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Subaidi, S. Ag., M.Si
NIP. 197505172005011004

Penguji I


DR. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
NIP. 197311051996031002

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 196301311992031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

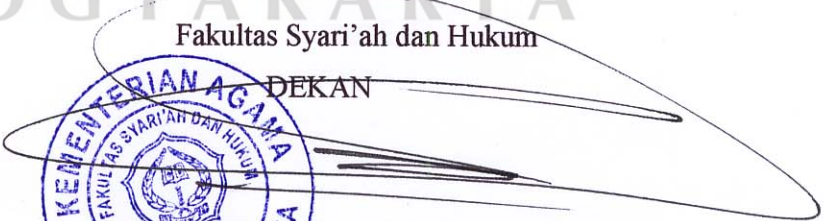
Yogyakarta, 21 Januari 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, P.hD
NIP. 196004171989031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHAN KEPADA :

SUAMI TERCINTA, PUTRA-PUTRIKU ABD CHAEDAR AHMAD ELFARABIE

DAN FUSHA ALBANIA ‘AGRAM SERTA BAYI DALAM RAHIM

YANG TERSAYANG

KEDUA ORANG TUA DAN SAUDARA-SAUDARIKU TERCINTA

ALMAMATERKU TERCINTA

TEMAN-TEMAN DAN DOSEN-DOSEN

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

"CINTAILAH KEHIDUPAN ANDA

SEPERTI

ANDA MENCINTAI TUBUH ANDA"

KELUARGA ADALAH KEHIDUPAN,

ILMU ADALAH KEHIDUPAN,

KELUARGA BERILMU ADALAH KEHIDUPAN KEBAHAGAIAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	T}ā	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين *Muta' aqqidāin*

عدّة *'Iddah*

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبّة *Hibah*

جزية *Jizyah*

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t.

نعمة الله *Ni' matullāh*

زكاة الفطر *Zakātul-fitri*

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I

-- ُ --	Dammah	u	U
---------	--------	---	---

5. Vokal Panjang

- a. Fath}ah dan alif ditulis ā

جاهلية *Jāhiliyyah*

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى *Yas'ā*

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد *Majīd*

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض *Furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم *Bainakum*

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول *Qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم *A'antum*

لإن شكرتم *La'in syakartum*

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران *Al-Qur'ān*

القياس *Al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء *As-samāi*

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض *Żawi al-furūd*

اهل السنة *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي،
أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala Rahmat, Hidayah dan Taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam menyelesaikan skripsi berjudul: ***“Strategi DPW DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur Dalam Menghadapi Pemilu 2004 Menurut Hukum Islam”***

Maka penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. DR., Musa Asy'arie selaku Rektor UIN yang telah memimpin dan membuka paradigama baru bagi kemajuan civitas akademik.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat M. Hum selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan penelitian ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag, Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya sehingga dapat terlesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. DR. HM. Nur, S.Ag., M.Ag Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Bapak Drs. KH. Ahmad Malik Madaniy, MA selaku mantan Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum, terimakasih atas pelajaran disiplin yang telah diajarkan.
8. Ucapan kasih sayang tersampaikan untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat kepada keluarga "kecil" kami.
9. Terima kasih yang setulusnya kepada suami tercinta Faisal Ahmad yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan tenaga buat Penyusun.
10. Ucapan kasih sayang selalu tercurah untuk putra tercinta Abdullah Chaedar Ahmad el-farabie, putri tersayang dan tercantik Fusha Albania 'Agram serta untuk calon anak ku si "Fulan" yang selalu menemani denyut kehidupan.
11. Rekan-rekan Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah beserta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat motivasi dan dukungannya, karena kalian adalah sahabat yang sangat berharga selama lamanya, semoga amal kalian dibayar mahal oleh Allah SWT.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik dan ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 17 Muharram 1431 H
3 Januari 2011M

Penyusun



MUWALLIYATUZ ZAHRA
NIM. 04370067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTO.....	ix
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AL-MAŞLAHAH DAN ETIKA POLITIK	25
A. Seputar Al-Maşlahah	25
1. Pengertian <i>Al-Maşlahah</i>	27
a. <i>Maşlahah Mu'tabaroh</i>	27

b. <i>Maşlahah Mulghay</i>	29
c. <i>Maşlahah Mursalah</i>	29
2. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> Ruang Lingkup dan Syarat-Syarat	30
3. <i>Maşlahah Mursalah</i> Sebagai Dasar Hukum	34
B. Seputar Etika Politik	43
1. Epistemologi Etika	43
2. Pengertian Etika	46
3. Sumber Etika	49
4. Tiga Bidang Etika	51
C. Strategi Dalam Pandangan Islam	57
1. Pengertian Strategi	57
2. Prinsip Sistem Politik dan Kenegaraan dalam Islam...	60
BAB III : DPW PPP JAWA TIMUR MENGHADAPI 2004	64
A. Gambaran Umum		
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	64
1. Sejarah Berdirinya	64
2. Basis Sosial Pendukung PPP	66
a. NU	66
b. MI	68
c. PSII	69
d. PERTI	71
B. Karakteristik	74

1. Masyarakat Agama	75
2. Kehidupan Politik Bermoral	75
3. Kehidupan Ekonomi Berkeadilan	76
4. Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis.....	76
C. Misi, Visi, Dan Platform	77
1. Visi	78
2. Misi	79
3. Asas	82
4. Platform	86
D. Prinsip Perjuangan	
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	92
1. Prinsip Ibadah	92
2. Prinsip <i>Amar Ma'rūf Nahi Munkar</i>	92
3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan	93
4. Prinsip Musyawarah	94
5. Prinsip Persamaan dan Persaudaraan	94
6. Prinsip Istiqomah	95
E. Gambaran Umum Strategi DPW PPP Jawa Timur Menghadapi Pemilu 2004	96
1. Strategi Pemenangan Pemilu 2004	
DPW PPP Jawa Timur	96
2. Target Pemenangan Pemilu 2004	
DPW PPP Jawa Timur	108
a. Target DPRD Kabupaten	109
b. Target DPRD Provinsi	112

c. Target DPR RI	114
3. Capaian Pemilu 2004 DPW PPP Jawa Timur	
a. Suara dan kursi DPRD Kabupaten	116
b. Suara dan Kursi DPRD Provinsi.....	119
c. Suara dan Kursi DPR RI	121
4. Perbandingan Perolehan Kursi PPP Jawa Timur	
pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009.....	122
a. Kursi PPP di DPRD Kabupaten Jawa Timur.....	122
b. Kursi PPP di DPRD Provinsi Jawa Timur.....	126
c. Kursi PPP di DPR RI.....	126
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STRATEGI	
PEMENANGAN PEMILU 2004	
DPW PPP JAWA TIMUR	128
A. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> DPW PPP Jawa Timur	
Terhadap Strategi Pemenangan Pemilu 2004	128
B. Tinjauan Etika Politik DPW PPP Jawa Timur Terhadap	
Strategi Pemenangan Pemilu 2004	130
BAB V : PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	136
CURRICULUME VITTAE	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan dan perkembangan suatu partai politik¹ tidak terlepas dari AD/ART dan *platform* yang menjadi dasar perjuangan, pemahaman yang komprehensif terhadap situasi dan kondisi sosial politik dalam masyarakat serta solusi kongkrit yang diberikan atas persoalan kemasyarakatan. Partai politik dikenal oleh publik bukan hanya oleh ideologi yang menjadi landasannya tetapi juga sangat dipengaruhi oleh realisasi program kerja.

¹ Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yakni :

1. Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
2. R.H. Soltou: Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmund Neumann: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo: Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), hlm, 159.

Sebagai partai politik yang telah berkiprah dalam pergerakan politik Indonesia selama tiga dekade lebih, tidak sedikit sumbangan yang sudah diberikan PPP bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Sejarah perjuangan PPP dalam dinamika politik Indonesia dapat dikatakan sebagai perjalanan meresapnya nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial politik di tengah-tengah pluralitas masyarakat. Sebagai partai Islam, derap langkah PPP tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang melandasi gerak perjuangannya.

Seiring perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia dan runtuhnya penguasa otoriter Orde Baru serta bergulirnya reformasi. Dengan diusianya yang berkepala tiga, PPP ternyata tetap eksis di era multi partai. Hal ini membuktikan bahwa PPP tetap dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah perjuangan aspirasi rakyat. Selama itu pula PPP tetap konsisten dengan prinsip perjuangan yang berpihak pada rakyat.

Selama Orde Baru, dikala kekuatan-kekuatan politik Indonesia dibatasi hanya tiga partai, PPP berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan nilai-nilai moral dalam bingkai Islam. Hal ini wajar karena PPP adalah satu-satunya partai yang berbasis Islam hasil fusi dari NU, MI, Perti, dan SI. Tercatat dalam lintasan sejarah politik Indonesia, PPP menjadi pelopor terdepan dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam untuk menjaga agar produk perundang-undangan tetap senafas dengan ajaran Islam. Ini tercermin dalam UU Peradilan Agama, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pengadilan Anak, UU Perkawinan, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Penyelenggaraan Haji. Di samping itu,

pemberantasan perjudian (SDSB) juga merupakan salah satu hasil perjuangan politik PPP dalam komitmennya terhadap nilai-nilai moral.²

Semua itu adalah upaya PPP untuk menanamkan pelaksanaan ajaran Islam menjadi peraturan perundang-undangan organik serta menjaganya agar tak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Kiprah politik PPP di tengah dominasi Golkar dan ketidakberdayaan PDI waktu itu seolah menjadi angin segar bagi umat Islam yang merindukan menggemanya suara moralitas dalam perpolitikan Indonesia. Dengan perolehan suara di tiap pemilu yang rata-rata mencapai 17%, tampilan PPP di hadapan umat mencerminkan kekuatan politik yang tidak gentar menghadapi keperkasaan “sang raksasa” Golkar dalam menegakkan moralitas politik. Di tengah intimidasi dan peminggiran peran politik oleh kekuasaan hegemonik pemerintah Orba, PPP tetap tegar mempertahankan jati diri dan setia dalam *ghirah* perjuangannya menegakkan prinsip *Amar Ma'rūf Nahi Munkar*.

Akan tetapi, situasi mendadak berubah manakala Orba tumbang dan Indonesia memasuki era baru sistem politik yang menghalalkan berdirinya organisasi sosial politik. Kemunculan partai-partai baru, terutama yang berbasis massa Islam seperti PKB, PAN, PK (yang kemudian berubah PKS), dan PBB; tak pelak menjadikan PPP bukanlah satu-satunya pemain dalam lapangan politik Islam. Dalam satu sisi, PPP mendapat mitra kerja baru dalam menyuarakan

² Partai berlambang ka'bah ini memang hidup di era Orde Baru, tetapi PPP bukan bagian dari rezim, sebaliknya PPP sering sekali berada berseberangan dengan sikap politik penguasa. Adalah tuduhan yang tidak beralasan jika PPP dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Ahl tersebut dibuktikan secara *de facto* pada sidang umum dan istimewa MPR 1998, PPP menunjukkan sikap yang berani menggulirkan reformasi dan memposisikan diri di barisan terdepan.

aspirasi Islam, tetapi di sisi lain PPP juga masuk dalam arena kompetisi ketat dalam memperebutkan suara umat Islam. Konsekuensinya, PPP tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan umat yang mencita-citakan berjayanya politik Islam. PPP bukan lagi kekuatan politik tunggal yang dilirik umat Islam sehingga suara pada pemilu 1999 mengalami penurunan drastis sehingga pada pemilu 2004 para pengamat memastikan PPP akan tergusur dari perpolitikan nasional. Ada dua hal fundamental yang menarik dari pemilu 2004 bagi PPP :

1. Psikologis pemilu 1999 masih terbawa dan belum terlupakan oleh para pemilih terhadap PPP yang dianggap residu dari rezim Orde baru.
2. Pemilu 2004 jauh lebih berat daripada pemilu 1999, dikarenakan:
 - a. Pemilu 1999 adalah fase tekanan dan *image* "partai yang harus dibuang" dari era reformasi karena merupakan residu Orde Baru.
 - b. Pemilu 2004 adalah fase mengangkat keterpurukan PPP di masa pemilu 1999 atau pasca reformasi 1997-1998.

Merujuk pada penelitian *locus* dan *tempus* yang penyusun tulis, secara singkat akan dikemukakan rumusan jati diri DPW PPP Jawa Timur meliputi empat hal.

Pertama, DPW PPP Jawa Timur sebagai partai umat yang memperjuangkan umat Islam dan politik dalam satu kesatuan.

Kedua, DPW PPP Jawa Timur sebagai suatu kekuatan transformatif (penegak penerapan) nilai-nilai ajaran Islam dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

Ketiga, DPW PPP Jawa Timur sebagai kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam.

Keempat, DPW PPP Jawa Timur sebagai akselerator (elemen pemercepat) bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia yang berasaskan Islam yang berwawasan nasional, beroreintasi keumatan, kerakyatan, dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan budaya dan prilaku politik Islami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Sebagai salah satu partai Islam terbesar seyogyanya mempunyai strategi dalam perekrutan kader. Perekrutannya Jelas berbeda dengan partai-partai Islam lainnya. Oleh karena itu proses rekrutmen di PPP dengan seleksi moral yang ketat. Kebanyakan kader PPP adalah kader lulusan pondok pesantren, selain sudah mendapat gemblengan dengan metode tarbiyah pesantren, dalam proses selanjutnya melalui program rutin yang penuh didikan dan tausiyah serta wawasan, sehingga ketika kader PPP kedepannya terjun ke dunia praktis sudah memiliki bekal moral yang memadai. Itu sebabnya kader PPP berbeda dibandingkan dengan kader yang lain, perbedaan moral dan perilaku politik yang masih terbingkai syariat Islam.

³ Pamlet PPP, Sekilas Jati Diri PPP, Th.2003

Dengan modal *tangible asset* baik berupa fasilitas gedung, kendaraan dan pengalaman politik. PPP dengan modal *intangibile asset* pun (harta tidak terlihat), mampu melebarkan sayap pengaruhnya di tengah-tengah umat. justru kekayaan terbesar PPP adalah sumber daya manusia “berlabel” pesantren yang bermoral. Dimana didalam masyarakat kader “berlabel” pesantren mampu menjadi tauladan.⁴

PPP adalah salah satu partai Islam yang masih eksis di era reformasi adalah juga suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam satu lompatan pemilu mampu merengkuh suara signifikan.

Prestasi inilah yang menarik untuk diteliti, sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa PPP yang merupakan bagian dari partai Orde Baru yang sebagian banyak pengamat politik nasional mengatakan setelah era reformasi PPP akan mengalami kemerosotan suara yang tajam.

Pertanyaan selanjutnya ialah dengan peningkatan suara yang begitu signifikan pada pemilu 2004, berbarengan dengan situasi dan kondisi “guncangan kejiwaan” secara politik pada masa transisi reformasi, pada satu sisi pula PPP mengalami peningkatan suara pada pemilu 2004, apakah perolehan suara tersebut bersumber dari *amaliyah siyasah* yang tertuang pada strategi pemenangan pemilu 2004 yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (sesuai aspirasi umat Islam)? Karena PPP adalah partai yang menyatakan dirinya sejak lahirnya sebagai partai Umat atau partai yang memperjuangkan Islam.

⁴*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana strategi DPW PPP Jawa Timur pada pemilu 2004.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Strategi DPW PPP Jawa Timur pada Pemilu 2004

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah tentunya penelitian ini mempunyai suatu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur pada pemilu tahun 2004.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi fakultas Syari'ah dan khalayak umum yang berkompeten dengan studi mengenai partai politik dan pemikiran politik Islam.
- b. Bagi pemerhati dan peminat kajian politik, studi ini sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan politik, terutama sekali untuk mendorong terciptanya suatu iklim politik yang kondusif dan lembaga-lembaga politik yang lebih bermoral serta beretika.
- c. Sebagai salah satu sumbangsih terhadap DPW PPP Jawa Timur.

D. Tinjauan Pustaka

Seringkali suatu penelitian merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan obyek ataupun tema tersebut dan urgensitas terhadap penelitian maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian.

Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwasanya DPW PPP Jawa Timur adalah salah satu partai yang sering dibicarakan oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, sudah banyak buku ataupun skripsi yang membahas partai ini. Namun sepanjang pengamatan penulis dari berbagai macam penelitian dalam studi tersebut, skripsi atau buku yang khusus membahas tinjauan hukum Islam tentang target dan strategi DPW PPP Jawa Timur menghadapi pemilu 2004 khususnya di wilayah Jawa Timur belum ada. Disamping itu, sebelum menganalisis lebih lanjut. Untuk menghindari dari penelitian yang sama dalam satu obyek, penulis akan menelaah karya lain yang membahas masalah ini. Karya yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Fathurrozi, mahasiswa fakultas syari'ah dengan judul "PPP dan Azas Tunggal, Studi Oreintasi Politik PPP 1984-1992". Yang berisi tentang PPP menempatkan dirinya sebagai partai Islam yang tidak bertentangan dengan pancasila.⁵ Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nursidi, mahasiswa fakultas syariah yang berjudul " Konflik Internal PPP Tahun

⁵ Fathurrozi, PPP Dan Azas Tunggal, Studi Oreintasi Politik PPP 1984-1992. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

1980-1989”.⁶ Dalam karyanya membahas masalah pergumulan konflik internal di tubuh PPP dan sebab munculnya konflik tersebut. Sedangkan Abdul Aziz, dalam bukunya yang berjudul ”Politik Islam Politik. Pergulatan ideologis PPP menjadi partai Islam hanya membahas embrio lahirnya PPP dan sejarah pergulatan PPP menjadi sebuah partai Islam yang disegani”.

Sulitnya mendapat buku-buku dan referensi yang berhubungan langsung dengan tema penyusun dan mayoritas buku-buku tersebut hanya berkaitan langsung dengan Partai Persatuan Pembangunan secara global, hal ini dapat ditemukan pada buku-buku panduan anggota partai. Seperti buku yang berjudul, Islam Fungsional, Paradigma Baru PPP, (Jakarta: Bina Pena Pariwara). Buku karangan Eggi Sudjana ini memaparkan visi dan misi, karakteristik, prinsip kebijakan PPP kedepan guna menjadi partai Islam yang fungsional modernis.

Berdasarkan dari pencermatan dan penelitian yang telah dilakukan tersebut, baik-dari buku-buku yang dipaparkan maupun skripsi dan karya ilmiah lainnya tentang PPP tidak ditemukan adanya kesamaan obyek penelitian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinal dan bukan merupakan duplikasi dan plagiat dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Setiap partai politik, termasuk Partai Persatuan Pembangunan, memiliki kemauan untuk melakukan eksplorasi eksistensi dirinya. Karena identitas partai politik bukan hanya merupakan pilihan simbolis, tetapi juga terkait dengan pilihan

⁶ Muhammad Nursidi, "Konflik Internal PPP Tahun 1980-1989". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

ideologis. Sebagaimana Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki ketetapan hati menjadikan ajaran Islam sebagai asasnya. Pilihan tersebut memiliki akar historis dan dinamika politik yang mewakili aspirasi umat Islam Indonesia, tetapi juga menimbulkan problematika eksistensi politik.

Oleh karena itu, standarisasi setiap Partai Politik bertumpu pada dua hal utama:

1. Keberpihakan Partai Politik Terhadap Aspirasi Rakyat

Nilai keberpihakan partai politik terhadap rakyat dapat dilihat dari kebijakan dan keberpihakannya dalam melakukan eksplorasi politik

2. Simpati Rakyat Terhadap Partai Politik

Rasa simpati rakyat merupakan dambaan setiap partai politik, karena simpati merupakan ikatan awal melakukan kontrak dan keberpihakan politik.

Berdasarkan hal itu, maka penilaian akhir dari proses panjang penampilan politik tersebut bermuara pada dua hal utama;

1. Keterlibatan Rakyat dalam Kegiatan Partai Politik

Keterlibatan rakyat dapat setiap moment politik merupakan salah satu indikasi ketertarikan rakyat terhadap partai politik.

2. Pemberian Suara Rakyat pada Pemilu

Ujung dari keberpihakan tersebut adalah penumpukan suara rakyat sebagai kekuatan aspirasi dan keberpihakannya terhadap partai politik.⁷

Partisipasi merupakan jantung dari demokrasi. Semakin baik kualitas partisipasi, maka demokrasi semakin baik pula. Menurut Samuel P. Huntington dan Nelson terdapat dua model partisipasi, yaitu :⁸

1. Partisipasi yang bersifat otonom (*Autonomous Participation*)
2. Partisipasi yang dikerahkan (*Mobilized Participation*)

Partisipasi yang bersifat otonom jauh lebih baik daripada partisipasi yang dikerahkan karena lahir dari pengorbanan dan kesukarelaan masyarakat untuk terlibat langsung dalam hak-hak mereka. Sedangkan partisipasi yang dikerahkan hanya membawa kepentingan elit politik tertentu.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh dari riwayat Thalhah, Rafi' bin Khudaij, A'isyah, dan Anas r.a. dikatakan;

أنتم أعلم بأمر دنياكم⁹

Hadist diatas bisa diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk menentukan sikap dan tingkah laku tanpa adanya pertentangan dengan *syari'ah* . Serta juga mengacu pada konsep hukum Islam lainnya,

إنا صاحب الولاية أدرى ما فيها

⁷ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1996), cet. II hlm. 67

⁸ Zuhairi Misrawi, *Islam Negara & Civil Society, Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 297.

⁹ Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih-nya, dalam kitab Al Fadlail, dari riwayat Thalhah, Rafi' bin Khudaij, A'isyah, dan Anas r.a. (hadist-hadist no. 2361-2363) dari Shahih Muslim, tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqy, (Bandung, PT Al-Ma'arif:TT), Juz II

Sebagaimana pernyataan Ibn ‘Aqîl juga yang dikutip oleh Ibn Qayyim, bahwa *siyâsah* adalah kebijakan yang lebih mengedepankan kemaslahatan dan menghindari instabilitas sektor-sektor publik, meskipun kebijakan tersebut tidak pernah dibuat Rasulullah dan tak dijelaskan wahyu

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب إلى الصلاح و ابعد إلى الفساد و إن لم يضعه
الرسول ولا نزل به وحي

Dan mengacu pada konsep politik modern seperti yang dikemukakan oleh Daniel Lerner bahwa partisipasi membedakan politik modern dengan politik tradisional. Meminjam istilahnya Gabriel Almond dan Sidney Verba. Kebudayaan politik dunia yang baru adalah suatu kebudayaan politik dalam partisipasi.

Senada dengan itu bahwa perkembangan politik kata Dankwart Rustow bisa didefinisikan sebagai

1. Suatu peningkatan persatuan politik nasional
2. Suatu perluasan dasar partisipasi politik

juga sejalan dengan itu Fred Rigg mengatakan perkembangan politik menunjukkan pada proses politisasi yaitu peningkatan atau keterlibatan warga negara didalam kegiatan-kegiatan negara, didalam perhitungan-perhitungan power (pemilu) dan konskuensinya-konskuensinya.¹⁰

¹⁰ Yahya Muhaimin, Colin MacAndrews. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, cet. ke-7 (Yogyakarta, Gajahmada University Press: 1995), hlm, 64.

Dengan mengutip juga pernyataan Imam Syafi'i

لا سياسة إلا ما وقف به شرع

(tidak ada politik kecuali yang sejalan dengan syariat) dimaksudkan agar semua kebijakan dan produk politik harus sejalan dengan tujuan syariah. Tidaklah mengherankan juga apabila Ibn Aqil mengarahkan politik hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan kolektif dan mampu membentengi masyarakat dari berbagai ancaman.¹¹

Dalam suatu ayat Allah SWT berfirman:¹²

ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن لیبيلوكم في ما اناكم فاستبقوا الخيرات

Ayat di atas menerangkan bahwa pada setiap umat terdapat aturan atau jalan nyata dalam agama yang mereka tempuh untuk menguji manusia mengenai apa yang diberikan-Nya yaitu syari'ah yang bermacam-macam. Ujian tersebut dimaksudkan supaya diketahui siapa diantara hamba-Nya yang taat dan yang durhaka.¹³

Para ulama menyatakan bahwa al-maslahat dalam pandangan syar'i terbagi dalam tiga kategori, yaitu:¹⁴

¹¹ Asmuni Mth, *Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam*, (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih), dikutip dari Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006, hlm. 186.

¹² Al-Māidah (5) : 48

¹³ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut asbābun Nuzūl ayat surat al-Fātihah s.d. al-Isrā*, alih bahasa Bahrun Abubakar, cet. ke-2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 450-451

¹⁴ Untuk bahasan ini selengkapnya lihat: Mushthafa Sa'id al-Khunn, *Asar al-Ikhtilāf fī Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqāha'* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981), hlm. 552-554.

a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang dinyatakan secara tegas oleh dalil syara' agar dipelihara dengan baik. Kemaslahatan yang termasuk kategori ini dibagi dalam tiga peringkat.

1) *Ad-daruriyāt*, yaitu kemaslahatan yang menjadi sendi utama kehidupan manusia, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi.

2) *Al-ḥajiyāt*, kemaslahatan yang kepentingannya bagi manusia termasuk kebutuhan sekunder. Kemaslahatan jenis ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan manusia. Tidak terwujudnya kemaslahatan jenis ini akan menimbulkan kesulitan bagi manusia, tetapi tidak sampai mengakibatkan keguncangan sistem hidup mereka.

3) *At-Tahsiniah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut cara-cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat tersier dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Misalnya berpakaian yang sopan dan indah dalam pertemuan atau pesta, menghindari makanan berbau yang bisa mengganggu orang lain dan lain sebagainya.

b. *Al-Maṣlahah al-Mulgay*, yaitu suatu kemaslahatan yang secara hukum syara' tidak termasuk dalam kategori maslahat. Misalnya perbuatan bunuh diri. Bagi si pelaku, mungkin hal itu dianggap membawa manfaat karena perbuatan tersebut menolongnya untuk

mengurangi penderitaan hidupnya. Tetapi kemaslahatan seperti ini tidak dibenarkan oleh hukum dan secara tegas dilarang oleh nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadits.

- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang oleh hukum tidak dinyatakan kebenarannya dan juga tidak ditegaskan ketidakbenarannya. Kemaslahatan jenis ini bersifat netral, dalam arti tidak ditemui dalil dari al-Syari' yang dapat dijadikan dasar pembenaran dan atau pembatalan. Kemaslahatan jenis ini bersifat netral, dalam arti tidak ditemui dalil dari *al-Syari'* yang dapat dijadikan dasar pembenaran dan atau pembatalan.¹⁵

Tidak ada kesepakatan dari para ulama' mengenai keujahan masalah mursalat sebagai salah satu metode penggalian dan penetapan hukum Islam. Pendapat yang mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai dasar untuk *istiṣlah* adalah cara yang diakui oleh syara' untuk menetapkan hukum dalam kasus dimana tidak ditemukan nash dan ijma' yang menetapkan atau menggugurkannya. Pendapat ini dipelopori Imam Malik dan kemudian disepakati oleh Imam Ahmad.

Argumen-argumen yang mendukung pendapat ini yaitu:

- a. Hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan prinsip mengambil kemanfaatan dan mencegah kejahatan serta kerusakan. Permasalahan yang dihadapi manusia selalu berkembang dan berubah mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Jika manusia, dalam hidupnya menemukan

¹⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan; Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999), hlm. 23.

suatu masalah yang tidak ada penegasan *syara'* mengenai pembenaran atau pembatalannya, maka masalah itu harus diputuskan berdasarkan prinsip kemaslahatan di atas. Jika hukum Islam harus berhenti pada kasus-kasus yang ada *i'tibarnya* sehingga memungkinkan analogi (*al-Qiyās*) maka berarti hukum Islam meniadakan kemaslahatan bagi manusia. Juga hal ini sekaligus menunjukkan kebekuan hukum Islam dan ketidakmampuannya merealisasikan kemaslahatan dan kebajikan bagi manusia yang secara hakiki merupakan tujuan syari'at Islam itu sendiri. Berdasarkan *istiqra'* (penelitian), hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia. Karena itu, hukum yang telah diputuskan atas dasar *Maṣlahah Mursalah* merupakan keputusan syari'at yang sesuai dengan jiwa hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebab, dimana ada masalah di situlah syariat Allah SWT.¹⁶ 2) Semua *Maṣlahah* yang menjadi landasan hukum syariat, baik yang disebut secara eksplisit maupun implisit, adalah rasional dan logis. Dengan demikian, akal sebenarnya mampu memikirkan kemaslahatan yang dituju oleh syariat termasuk dalam kasus-kasus yang tidak ada penegasannya dalam nash dan ijma'. Karena itu, *istiṣlah* hanya terbuka pada bidang muamalah dan sejenisnya yang pada dasarnya

¹⁶ Mushthafa Sa'id al-Khunn, *As'ar al-Ikhtilāf fī Qawā'id*, hlm. 152, lihat juga 'Abd al-Wahab al-Khallaf, *Maṣādir at-Tasyri' al-Islāmi fī Mā Lā Nasfin* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 150.

bisa dinalar dan diteliti kemaslahatannya oleh akal manusia.¹⁷

Sedangkan dalam kaitannya dengan strategi dalam ranah pemikiran politik Islam terutama masa klasik memiliki beberapa kecenderungan, secara spesifik diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Kecenderungan hukum (*juristic trend*) dalam pemikiran ini mengajukan teori legitimasi dari sudut pandang hukum Islam yang mengedepankan aspek legalitas.
- b. Kecenderungan administratif-birokratis (*bureaucratic trend*) menekankan pada kerangka pemerintahan atau institusional kelembagaan dan penekanan pada fungsionalisasi aparatur pemerintah.
- c. Kecenderungan filosofis (*philosophic trend*) menekankan pada kerangka ideal dari sebuah pemerintahan Islam, kecenderungan etis yang menekankan aspek normatifitas nilai-nilai moralitas dalam perilaku politik.¹⁸

Sedangkan dalam pendekatan filsafat, studi tentang moral mempunyai beberapa teori yaitu etika normatif, etika deskriptif dan metaetika. Etika deskriptif berusaha menjelaskan pengalaman moral dengan cara deskriptif, mengetahui motifasi kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam kelakuan manusia. Etika

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁸ M. Sirajudin Syamsuddin, *Pemikiran Politik (Aspek yang terlupakan dalam sistem pemikiran Islam)* dalam Ihsan Ali Fauzi, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 tahun Harun Nasution* (Jakarta; LSAF, 1989), hlm. 244-249.

deskriptif ini berusaha membedakan “apa yang ada” dengan “apa yang harus ada”. Etika normatif lebih menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan (*should behave*) atau keharusan (*the ought*) untuk menentukan suatu perbuatan dan membuat evaluasi keputusan-keputusan tentang baik dan buruk, benar atau salah. Pada intinya merupakan pilihan dan penilaian. Sedangkan metaetika memusatkan perhatian pada analisis, arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika.¹⁹ Secara garis besar metaetika mempunyai dua aspek yaitu;

- a. Terfokus pada definisi terma tentang etika itu sendiri.
- b. Menguji dan mengkritisi dasar-dasar pokok sistem etika.²⁰

Di dalam masalah perpolitikan Islam telah meletakkan beberapa prinsip. Prinsip itu antara lain adalah mewujudkan kemaslahatan ummat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*ma'lahah al-ummah*). Sedangkan tujuan substantif disyari'atkannya hukum-hukum agama (*syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.²¹ Selanjutnya kemaslahatan itu sendiri nantinya akan melindungi hak-hak dasar manusia yang terdiri dari;

- a. Hak dan kebebasan agama (*hifz}u ad-Din*)
- b. Keselamatan fisik atau jiwa (*hifz}u an-Nafs*)
- c. Keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz}u an-Nasl*)
- d. Keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz}u al-Māl*)

¹⁹ Harold H. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, alih bahasa, H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 21-22.

²⁰ Anthony F. Falikowski, *Moral Philosophy; Theories, Skill, and Applications* (New Jersey: Prantice Hall, 1990), hlm. 92-93

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqih*, cet. XI, (Kairo; Dar al-Qalam,1977), hlm. 197

- e. Keselamatan akal atau kebebasan berfikir (*hifzu al-`Aql*)

Pada dataran mekanisme pelaksanaan sistem politik dan kenegaraan, al-Qur'an memberikan empat prinsip yang bisa dijadikan asas, yaitu:

- a. Asas Amanah
- b. Asas Keadilan dan Keselarasan.
- c. Asas Ketaatan atau Disiplin
- d. Asas Musyawarah dengan referensi al-Qur'an dan as-Sunnah.²²

M. Amien Rais dengan paradigma fungsional dan struktural menjelaskan bahwa politik berfungsi sebagai alat untuk berumat, sehingga berpolitik harus sesuai dengan nilai-nilai dalam berumat. Moralitas dan etika kegiatan berumat dalam bidang apapun harus bersumber pada tauhid, sehingga moralitas dan etika politik Islam juga harus bersandar pada tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid dilepaskan dari politik, politik akan berjalan tanpa arah dan membawa pada kesengsaraan orang banyak.²³

Islam tidak menghalalkan cara-cara politik kotor, akhlaq atau moral dan etika politik harus menjadi acuannya. Islam harus selalu hadir menjadi nafas dalam seluruh kehidupan manusia termasuk di dalam masalah politik. Seorang muslim yang memilih politik sebagai lapangan perjuangan harus menegakkan moralitas Islam.

²² Abdul Mu'in Salim, *Fiqh; Siyasaah Konsep Kekuatan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta; PT Grafindo Persada, 1994), hlm. 306

²³ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), hlm.28

- a. Tidak boleh larut dalam opini publik yang sekuler atau Marcheivelis dan memandang bahwa dalam politik boleh bertindak kotor serta menghalalkan segala cara.
- b. Seorang muslim harus berumat untuk menegakkan akhlaq Islam dalam politik.
- c. Seorang muslim yang terjun dalam politik harus melakukan *Amar Ma'rûf Nahi Munkar*.²⁴

Disamping itu ada lagi syarat yang kaitannya dengan pembahasan strategi, menurut al-Ghazali sebagian yang dikutip oleh Imam Faeruzabadi, yaitu: kekuasaan harus berkaitan dengan akhlaq (etika) politik yang sesuai dengan al-qur'an.²⁵

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما
قتل الناس جميعا ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون²⁶

F. Metode Penelitian

²⁴ Hajrianto Y.Thohari, *Nafas Islam dan Moralitas Politik*, dalam Nurcholis Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern; Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam menuju Masyarakat Madani*, cet. I (Jakarta: Mediacita, 2000), hlm. 237-238

²⁵ Imam Faeruzabadi, "Akhlaq Politik menurut al-Gazali", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 96-108.

²⁶Al-Māidah (5) : 32

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah maka dibutuhkan metode yang akan mengarahkan untuk menjadi pedoman penulisan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penyusunan ini akan dilakukan penelitian mengenai "Target Dan Strategi DPW PPP Jawa Timur Menghadapi Pemilu 2004" langsung di propinsi Jawa Timur

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan atau peristiwa yang dianggap sebagai obyek ilmiah yang faktual. Seperti yang diungkapkan dalam Ke Aduh SWT²⁷ dilakukan analisa terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Adapun masalah yang ingin penyusun deskripsikan adalah "Target dan Strategi DPW PPP Jawa Timur dalam Menghadapi Pemilu 2004 Menurut Hukum Islam".

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melusuri bahan dokumen yang ada kaitannya dengan strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur menghadapi pemilu 2004 lalu. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan masalah yang ditelusuri lewat dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini mengumpulkan data primer yang

²⁷ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 67

berupa buku-buku, peraturan-peraturan, AD/ART, surat-surat keputusan yang merupakan dokumen Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur baik berupa buku, makalah, artikel, maupun medium lainnya melalui berbagai media. Disamping itu, penyusun juga mengumpulkan data-data skunder yang membahas target dan strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur dalam menghadapi pemilu 2004.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis. Maksud dari pendekatan normatif filosofis tersebut adalah suatu usaha untuk menggali nash-nash al-Qur`an maupun Hadis\ serta berfikir secara mendalam, sistematis radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada²⁸ yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian serta ada kaitannya dengan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam bertindak.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya penyusun melakukan analisis data dengan metode kualitatif²⁹ yang kemudian akan diolah dengan cara penyimpulan deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum setelah itu dijabarkan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus terhadap target dan strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi pemilu 2004.

²⁸ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat Jilid I*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 15

²⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-59.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Adapun hal-hal yang termuat pada Bab *pertama* adalah pendahuluan yang di dalamnya mengemukakan latar belakang masalah penelitian kemudian akan dirumuskan pokok masalah, tujuan serta kegunaan penelitian. Selanjutnya agar menjamin keorisinilan penelitian maka dipaparkan buku-buku, skripsi dan penelitian lain yang telah diobservasi. Supaya penelitian lebih sistematis dan tidak rancu perlu dibuat kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga benar-benar menjadi penelitian yang berkualitas.

Pada bab kedua akan dipaparkan tentang seputar *ma'lahah* dan etika politik. Dalam sub bab seputar *maṣlahah* akan dipaparkan tentang pengertian maslahat dan macam-macamnya, dilanjutkan dengan pengertian *maṣlahah mursalah*, ruang lingkup dan syarat-syaratnya, pembahasan berikutnya adalah *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum. Sedangkan dalam sub bab seputar etika politik akan dibahas tentang: epistemologi etika, pengertian etika, sumber etika, tiga bidang etika dan sub bab strategi dalam pandangan Islam.

Berikutnya adalah bab *ketiga* yang mendeskripsikan tentang strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur menghadapi pemilu 2004. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu; *pertama* gambaran umum Partai Persatuan Pembangunan yang meliputi; a. sejarah berdirinya, b. Karakteristik c. Visi, Misi, Asas dan *Platform*, dan d. Prinsip

Kebijakan. *Kedua* Gambaran Umum tentang Strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur menghadapi pemilu 2004.

Bab berikutnya adalah bab *empat*. Dalam bab ini penyusun akan berusaha untuk menganalisa dan mencoba memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah yang kami temukan dengan tujuan dapat mengungkap kebaikan ditengah banyaknya keburukan.

Akhir kesimpulan dari penelitian ini akan penulis tuangkan dalam bab *kelima*, yang sekaligus sebagai bab penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur dalam pemilu 2004 lalu telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dengan demikian dari skripsi ini dapat disimpulkan, bahwa target dan strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur pada pemilu 2004 lalu secara umum sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam khususnya prinsip *Al-Maṣlahah al-Mursalah* .

Target Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur tersebut sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam khususnya prinsip *Al-Maṣlahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang oleh hukum tidak dinyatakan pembedanya dan juga tidak ditegaskan ketidakebenarannya. Kemaslahatan jenis ini bersifat netral, dalam arti tidak ditemui dalil dari *al-Syari'* yang dapat dijadikan dasar pembedaan dan atau pembatalan. Meskipun strategi DPW PPP Jawa Timur yang dilandasi dengan prinsip *Al-Maṣlahah al-Mursalah* tersebut tidak bersifat hakiki, tetapi implikasi atau demi maslahat yang lebih besar yaitu memperjuangkan cita-cita partai dan Islam yaitu *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* di pemerintahan.

Sedangkan strategi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur yang diterapkan pada pemilu 2004 lalu cukup baik,

terbukti dengan terealisasinya secara umum target yang direncanakan. Selain itu juga strategi-strategi tersebut selaras dengan hukum Islam yakni

Strategi yang digunakan oleh DPW PPP Jawa Timur selalu bersendikan nilai-nilai keislaman yang di balut dengan Islam keindonesian. Tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan etika dalam politik Islam.

B. Saran-saran

Saran-saran ini penyusun tujukan bagi PPP yang akan melanjutkan perjuangan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* lewat pemilu-pemilu memdatang, dan warga masyarakat pada umumnya sebagai salah satu lapisan yang sangat menentukan dalam pemilu. Adapaun saran-saran yang penyusun

1. Jawa Timur adalah basis warga NU, diperlukan strategi khusus untuk menggaet suara organisasi terbesar tersebut dengan cara:
 - a. Merekrut tokoh-tokoh yang kecewa di pengurusan PKB, terutama dari kalangan kyai-kyai pesantren.
 - b. Optimalisasi gerakan-gerakan pencitraan politik di setiap waktu dan ruang dengan menggerakkan kader-kader yang duduk di struktural kepengurusan NU.
 - c. Optimalisasi struktur dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan warga NU.
2. Jawa Timur dibagi-bagi dalam tiga subkultural masyarakat yaitu Tapal Kuda, Mataraman, dan Arek. Ketiga subkultural tersebut

memiliki afiliasi politik yang berbeda-beda. Khususnya PPP yang hanya mampu menguasai daerah Tapal Kuda, dan sebagian wilayah Mataraman. wilayah subkultural arek yang berafiliasi ke partai-partai sekuler-nasionalis harus menjadi prioritas utama, tanpa meninggalkan basis-basis subkultural lainnya.

3. Dari segi pengkaderan non pesantren, PPP Jawa Timur sangat lamban. Diperlukan gerakan kaderisasi non pesantren dengan merekrut anak muda yang potensial dan profesional terutama di wilayah sub kultural Arek dan Mataraman.
4. Diperlukan optimalisasi elemen-elemen yang sifatnya sayap kanan partai seperti WPP, GMPI, GPK, dan AMK.
5. kalau dicemati terdapat penurunan nilai "sakralitas" kyai sebagai "Getter Vote". Untuk itu PPP harus juga mampu mencari alternative untuk meraih suara non-santri atau penganut politik pesantren.

Dalam hal penargetan suara, sebaiknya melibatkan seluruh elemen yang ada pada diri partai tersebut dalam merencanakan target perolehan suara. Disamping itu juga, target tersebut haruslah realistis.

Sedangkan strategi yang disusun, sebaiknya dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik, dan untuk tercapainya strategi harus memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Target yang ingin dicapai harus realistis rasional yang berdasarkan survei partai, hal ini bertujuan agar ada sinkronisasi antara target dan pemetaan

kekuasaan (strategi pemilu), yang berujung pada sejauh mana *cost* politik yang akan dianggarkan dalam menghadapi pemilu mendatang.

Political studies is not knowledge but actions, politik tidak hanya berputar pada pengetahuan teoritik semata, tapi politik menuntut kemampuan dalam menyusun, bertindak dan mengambil keputusan yang tepat. Ungkapan itulah yang penyusun dapat disimpulkan dan disampaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV. Diponegoro', 2004.

Shahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqy, Bandung, PT Al-Ma'arif: TT, Juz II

Fiqh

Abd Halim al-Jundi, *al-Imām asy-Syafi'ī Nasira as-Sunah wa al-Wadi` al-Uṣūl* Mesir: Dar al-Qalam, 1996

Abdul Mu'in Salim, "Fiqh Siyasaḥ, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran", (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2002

Al-Ghazali, *Al-Iqtishād fī al-I'tiqād* Mesir: Maktabah al-Jundi, t.t

A. Hafidz Ma'some, *Mewariskan Masa Depan Yang Cerah , Catatan Hati Nurani Aktivis PPP*, (Jombang, Yayasan Roushon Fikr : 2003

Abdul Aziz, *Politik Islam Politik, Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta, 2006

Arief Mudatsir Mandan, *Buku Kedua Daru Trilogi Pembaharuan PPP, Islam Indonesia, Inklusif, Modern, Dan Bermartabat, Mempertegas Asas Islam PPP* , Jakarta, Forum Indonesia Satu (FIS) : 2006

'Abd al-Wahab al-Khallaf, *Maṣādir at-Tasyri` al-Islāmi fī Mā Lā Nasfīn* , Kuwait: Dar al-Qalam, 1972

Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Mustafa as-Saqa' (ed.), cet.3, Beirut: Dar al-Fikr, 1955

- Asmuni Mth , *Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam*, Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih, *dikutip* dari Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006
- Ahmad Amin, *Akhlaq*, alih bahasa Farid Ma'rif Bandung: Pustaka, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tanpa tempat: t.p., t.t,
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Husein Hamid Hassan, *Nazariyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmiy* Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1971
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-‘uqūbah* , Tanpa Tempat: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1974
- Mushthafa Sa'id al-Khunn, *Asṣar al-Ikhtilāf fī Qawāid al-Uṣuliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqāha'*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981
- Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, alih bahasa Zakiyudin Baidhawiy Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1993
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqī'īn*, III Beirut: Dar al-Jail, 1973
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997
- Zakariyya al-Birr, *Maṣādir al-Ahkām al-Islāmiyyah* Mesir: Dar al-Ittihad al-‘Arabiy, 1975
- Muhammad Adib Shahih, *Maṣādir at-Tasyri' al-Islāmi*, Damaskus: Mansyurat: 1981
- Husein Hamid Hassan, *Nazariyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmiy* Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1971 diriyat al-Kutub al-Jam'iyyah, 1968

- Mushthafa Sa'id al-Khunn, *Asar al-Ikhtilāf fī Qawāid al-Uṣuliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqāha'*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981
- Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthy, *Dawabit al-Maṣlahah fī as-Syar'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasit fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978
- Pemi Apriyanto, *Database Pemilu 2004*, Jakarta, Spirit Of Indonesia Youth Creativity : 2007
- Ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah PPP, Surabaya: DPW PPP Jawa Timur : 2003
- M. Yusuf musa, *An Nidzom Al Hukmi fī Al Islam*, Al-Qohiroh : dār al ma'rifah, 1964
- Donal E. Smitt, *Agama Dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitik*, Kata Pengantar Amin Rais, Jakarta:Rajawali, 1985
- Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan; Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999
- Ismail Marzuki, *PPP Islam, Demokrasi, Dan Politik lokal, sukses menuju pemilu 2009*, cet. I , Barokah Print : 2006
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab al-Muhit*, Tanpa tempat: t.p., t.t Syed Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, alih bahasa Haidar Bagir Bandung: Mizan, 1992
- Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1996), cet. II hlm. 67
- Imam Faeruzzabadi, "Akhlaq Politik menurut al-Gazali", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004

Kacung Maridjan, *Qua Vadis NU: Nu Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Jakarta, Penerbit Airlangga: 1992

Yasin Muhammad, *Insan yang Suci; Konsep Fitrah dalam Islam*, alih bahasa Masyhur Abadi, Bandung: Mizan, 1997

Mushthafa Sa'id al-Khunn, *Asar al-Ikhtilāf fī Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqāha'*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981

M. Sirajudin Syamsuddin, *Pemikiran Politik, Aspek yang terlupakan dalam sistem pemikiran Islam*) dalam Ihsan Ali Fauzi, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 tahun Harun Nasution*, Jakarta; LSAF, 1989

M. Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987

Hajrianto Y.Thohari, *Nafas Islam dan Moralitas Politik*, dalam Nurcholis Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern; Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam menuju Masyarakat Madani*, cet. I, Jakarta: Mediacita, 2000

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thurūq al-Hukmiyyah fī as-siyâsah asy-Syar'iyyah*, ttp: Dar al-Hadîts-Kairo, 2002

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah Ajaran Agama dan Pemikiran*, Jakarta:

Rajawali Pers, 1994.

Bidang Ilmu lain

Anthony F. Falikowski, *Moral Philosophy; Theories, Skill, and Applications*, New Jersey: Prantice Hall, 1990

Allan A. Samson, *"Islam And Politic In Indonesia "*, Ph.D Desertation, University of California: berkeley, 1969

AD/ART PPP 2004

DPW PPP Jawa Timur, Buku Pintar 2003, Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur,
Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, cet. Ketujuh, Jakarta,
LP3ES :1994

Ensiklopedi Islam, jilid 4 PT. Ichtiar Van Horve: Jakarta, 1997

Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1992

Harold H. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, alih bahasa, H.M. Rasjidi ,
Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Harbert Feith, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, Ithaca,
NY: Cornell University Press, 1962

M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1995

M. Rusli Karim, *Hasil pemilu 1977, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia .
Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983

Muhammad Muslehuddin, *Morality; It's Concepts and Role In Islamic Order*
Lahore: Islamic Publication Ltd, 1998

Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais,
Hamzah Haz, Nurmahmudi, Matori Abdul Jalil, dan Yusril Ihza
Mahendra* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Tp, *Sukses pemilu 2004 Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta, LPP DPP PPP :
2003

Yahya Muhaimin, Colin MacAndrews. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*,
cet. ke-7 , Yogyakarta, Gajahmada University Press: 1995

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut asbābun Nuzūl ayat surat al-Fātihah s.d. al-Isrā*, alih bahasa Bahrūn Abubakar, cet. ke-2 , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004

Zuhairi Misrawi, *Islam Negara & Civil Society, Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan*, Jakarta: Paramadina, 2005

Lain-Lain

Database pemilu 2004 DPW PPP Jawa Timur, Surabaya : DPW PPP Jatim, 2005
Jawa Pos, 2 Desember 1998.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA